

English

The Jakarta Workshop CSO Statement on Palm Oil and Finance July 2013

From July 3-5, 2013, representatives of 36 civil society organizations (CSOs) from Malaysia, Indonesia, Philippines, Europe, Japan and North America came together in Jakarta to explore impacts and issues related to private sector financing of the palm oil sector in Southeast Asia. Participants developed the following statement:

Rapid and reckless expansion of large oil palm estates in SE Asia in combination with weak governance, unclear land tenure, and poor spatial planning is imposing human rights violations and billions of dollars in negative environmental, social and economic externality costs on the public at scales ranging from local communities to the global commons.

These unaccounted for costs include those associated with destruction of millions of hectares of rainforests, an associated loss of biodiversity, massive release of climate changing emissions, regional air pollution, public health impacts, social conflicts, and land grabbing, in contradiction to internationally recognized principles and norms of sustainable development and the protection of human rights.

Palm oil from SE Asia is now found in consumer products in countries around the world, making its association with deforestation and social conflict a global reality and responsibility. Expansion in Africa and Latin America now threatens similar problems there.

Indonesia

Pernyataan Bersama Lokakarya CSO tentang Minyak Sawit dan Sektor Keuangan Juli, 2013

Pada 3-5 Juli 2013, perwakilan dari 36 organisasi masyarakat sipil dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Eropa, Jepang dan Amerika Utara berkumpul bersama membahas berbagai dampak dan persoalan terkait pendanaan sektor swasta atas sektor minyak sawit di Asia Tenggara. Peserta membuat pernyataan bersama sebagai berikut:

Laju ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sangat cepat di Asia Tenggara, tata kelola yang lemah, kepemilikan lahan yang tidak jelas, dan perencanaan wilayah yang buruk menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan kerugian publik sebesar triliunan rupiah sebagai dampak eksternal yang negatif dari sisi lingkungan, sosial dan ekonomi pada skala lokal hingga global.

Biaya-biaya yang tidak diperhitungkan tersebut termasuk kerugian yang terkait dengan perusakan jutaan hektar hutan hujan, hilangnya keanekaragaman hayati, emisi iklim yang masif, polusi udara regional, dampak kesehatan publik, konflik sosial, perampasan lahan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang diakui secara internasional.

Minyak sawit dari Asia Tenggara sekarang dapat ditemukan pada produk konsumen di seluruh dunia, menjadikan hubungan antara kelapa sawit dengan penghancuran hutan dan konflik sosial sebagai tanggung jawab global. Ekspansi kelapa sawit di Afrika dan Amerika Latin mengancam masalah yang sama disana.

English

We believe that governments, the private sector and civil society have shared and differentiated responsibilities to address and resolve these issues. The private finance sector plays a key and unique role as a provider of capital to the palm oil sector, which, lacking appropriate safeguards and environmental and social performance safeguards or their effective application, enables destructive and often illegal palm oil expansion.

Land bank and plantation expansion is still the primary indicator for most analysts and asset managers in evaluating plantation companies' economic outlook, but such expansion is more and more an unsustainable and high-risk economic strategy. Instead, investors should develop alternative economic indicators, which align with social and environmental values such as increasing yields for smallholders.

Participants at the Jakarta workshop call on government regulators, banks and investors to develop palm oil finance performance standards and due diligence procedures to avoid financing of palm oil companies that fail to address the following issues of common concern.

Climate Change – The impacts of climate particularly threaten the natural resources and livelihoods of rural populations in developing countries. Anthropogenic climate change has been described as the largest market failure in human history.

Indonesia

Kami yakin bahwa pemerintah, sektor swasta dan masyarakat telah berbagi tanggung jawab dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah ini. Sektor keuangan swasta memainkan peran kunci dan unik sebagai penyedia modal bagi sektor kelapa sawit, yang tidak ada *safeguard*, khususnya *safeguard* atas kinerja sosial dan lingkungan, ataupun lemah dalam penerapannya, membiarkan perluasan kelapa sawit tidak sah dan merusak.

Perluasan cadangan tanah dan perkebunan masih merupakan indikator utama bagi sebagian besar analis dan pengelola aset dalam mengevaluasi kinerja ekonomi perusahaan perkebunan, namun kedua strategi ini tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Investor seharusnya mengembangkan indikator ekonomi alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan lingkungan, seperti misalnya peningkatan hasil buah petani kecil.

Peserta lokakarya menyerukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pihak perbankan dan investor untuk mengembangkan standar kinerja keuangan minyak sawit dan prosedur uji tuntas untuk menghindari pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menangani masalah-masalah berikut, yang menjadi perhatian bersama.

Perubahan Iklim – Dampak dari perubahan iklim terutama mengancam sumber daya alam dan penghidupan dari masyarakat yang hidup di daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Perubahan iklim antropogenik telah digambarkan sebagai kegagalan pasar terbesar dalam sejarah manusia.

English

Greenhouse gas emissions from peat land degradation in SE Asia are already equivalent to those from the transport sectors globally. The use of fires to clear peatlands is a major contributor to regional air pollution alerts, and imposes billions of dollars in public health costs and economic damages.

Oil palm expansion is a major driver of peatland degradation. Palm oil plantations on peatlands are projected to triple in the next one to two decades, with upwards of half a billion tons of associated CO2 emissions annually, unless current trends are reversed.

We believe the finance sector has a fiduciary duty and ethical obligation to ensure that its financing across all sectors of the global economy contribute to low carbon development pathways. Consistent with this, following its two year review of financing to the oil palm sector, World Bank group policies now explicitly prohibit financing of oil palm expansion on peatlands.

We call on the finance sector to ensure that all its financing to the oil palm sector strictly prohibits further direct or indirect conversion, expansion, drainage or the setting of fires on primary forests and any peatlands and to support peatland restoration.

Biodiversity and Deforestation– SE Asia’s rainforests are globally significant reservoirs of biological diversity, including for iconic species

Indonesia

Emisi GRK dari kerusakan lahan gambut di Asia Tenggara telah menyamai emisi dari sektor transportasi secara global. Penggunaan api untuk membuka lahan gambut menjadi penyumbang utama pencemaran udara yang sudah memasuki keadaan siaga, dan mendatangkan kerugian triliunan rupiah bagi kesehatan publik dan kerugian ekonomi.

Ekspansi kelapa sawit adalah penyebab utama kerusakan lahan gambut. Ekspansi sawit dalam lahan gambut diperkirakan akan meningkat tiga kali lipa dalam satu atau dua dekade mendatang, dan menyumbangkan lebih dari setengah miliar ton emisi CO2 per tahun, kecuali jika kecenderungan ini bisa dibendung.

Kami yakin sektor keuangan memiliki tugas penting dan kewajiban etis untuk memastikan agar pembiayaannya terhadap semua sektor ekonomi global dapat menyumbangkan pembangunan rendah karbon. Sejalan dengan hal ini, setelah dua tahun melakukan tinjauan atas pendanaan bagi sektor kelapa sawit, kebijakan kelompok Bank Dunia sekarang secara eksplisit melarang pembiayaan ekspansi kelapa sawit di lahan gambut.

Kami menyerukan kepada sektor keuangan untuk memastikan semua pembiayaan mereka pada sektor kelapa sawit secara tegas melarang alih fungsi, perluasan, pengeringan atau pembakaran langsung maupun tidak langsung di hutan primer dan lahan gambut manapun dan mendukung usaha pemulihan lahan gambut.

Keanekaragaman hayati dan Deforestasi – Hutan hujan Asia Tenggara merupakan tempat penampungan keanekaragaman hayati

English

such as the critically endangered Sumatran orangutans, tigers, elephants and rhinos. As recently as the 1960s, about 80 percent of Indonesia was forested, but with one of the highest deforestation rates in the world, less than half of Indonesia's original forest cover remains.

Ninety percent of oil palm expansion in Indonesian Borneo has occurred at the expense of tropical rainforests. At the same time, due to failures of effective spatial planning, millions of hectares of forests were cleared for oil palm and then abandoned.

Signaling the growing commercial urgency of the issue for producers, valuable consumer markets for palm oil increasingly demand deforestation-free, peatland expansion-free palm oil from their suppliers.

We call on banks and investors to ensure financing contributes to achieving zero deforestation, to sever ties with producers and suppliers linked to ongoing deforestation, and to support the development of government policies that further forest protection.

Rights of indigenous peoples and forest dependent communities - Standing forests are important sources of food, medicines and materials essential to the livelihoods of tens of millions of people in SE Asia and other parts of the tropics. Corresponding to the regions rich biological diversity is its rich cultural diversity, with over 500 hundred distinct indigenous languages in Indonesia alone.

Indonesia

yang penting secara global, termasuk spesies-spesies ikonik yang terancam punah seperti orangutan, harimau Sumatera, gajah dan badak. Sekitar tahun 1960-an, diperkirakan 80% wilayah Indonesia berhutan, namun dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, saat ini hanya ada kurang dari setengah dari tutupan hutan asli yang masih bertahan.

Diperkirakan 90% dari ekspansi kelapa sawit di Kalimantan telah terjadi dengan mengorbankan hutan hujan tropis. Pada saat yang sama, akibat kegagalan penataan ruang secara efektif, ada jutaan hektar hutan yang dibabat dengan dalih untuk kelapa sawit, namun kemudian ditinggalkan begitu saja.

Ini merupakan tanda semakin mendesaknya persoalan tersebut bagi produsen, pasar-pasar konsumen berharga bagi minyak sawit untuk terus meningkatkan tuntutan minyak sawit yang tidak membabat hutan, dan tidak merusak dari para pemasok mereka.

Kami menyerukan kepada pihak perbankan dan para investor untuk memastikan tercapainya deforestasi nol, untuk memutuskan hubungan dengan para produsen dan pemasok yang masih terlibat dengan deforestasi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan perlindungan hutan.

Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Hutan adalah sumber penting makanan, obat-obatan dan bahan-bahan yang penting bagi kehidupan puluhan juta orang di Asia Tenggara. Terkait erat dengan kekayaan hayati adalah keanekaragaman budayanya yang kaya, di Indonesia saja terdapat lebih dari 800 bahasa asli yang berbeda.

At the same time, the customary land rights of indigenous peoples and forest dependent peoples are too often not recognized or respected by governments, who award concessions for industrial oil palm concessions over their traditional lands without their free, prior and informed consent. This failure is provoking human rights violations, social conflicts and loss of livelihoods, and cultural diversity and identity.

We call on banks and investors to adopt financing safeguards consistent with upholding the rights of indigenous peoples, as articulated in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), and only support palm oil producers that can demonstrate that they respect the right of indigenous peoples and local communities to give or withhold their free, prior and informed consent to proposed developments and respect their customary rights to their lands and forests.

Forest Governance, Corruption and Money Laundering – Weak forest governance, pervasive corruption and widespread money laundering and tax evasion rob governments of billions of dollars in revenues that would otherwise be available to support essential and badly needed public services such as education, health and infrastructure.

Pada saat yang sama, hak-hak tanah adat masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan kerap kali tidak diakui atau dihormati oleh pemerintah, yang seringkali justru memberikan izin kepada pihak industri sawit di atas tanah tradisional masyarakat tanpa adanya Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) dari masyarakat yang bersangkutan. Kesalahan inilah yang menimbulkan melonjaknya jumlah konflik sosial dan hilangnya keanekaragaman budaya dan jatidiri yang ada.

Kami menyerukan kepada pihak perbankan dan investor untuk menerapkan *safeguard* pembiayaan, yang sejalan dengan pengakuan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana digaungkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), termasuk di dalamnya hak atas FPIC, dan membatasi dukungan bagi produsen minyak sawit yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memberikan atau menolak memberikan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan atas pembangunan yang diajukan serta menghargai hak mereka atas tanah dan hutan.

Tata Kelola Kawasan Hutan, Korupsi dan Pencucian Uang. Tata kelola yang lemah terhadap sektor kehutanan, korupsi yang sudah menyebar luas, dan praktik pencucian uang dan pengemplangan pajak di mana-mana adalah perampokan terhadap triliunan rupiah pendapatan negara yang sedianya digunakan untuk memenuhi layanan publik yang sangat penting dan teramat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan

English

Indonesia

A study by Human Rights Watch found that between 2003 and 2006, an annual \$2 billion in revenue lost to corruption and mismanagement in the timber sector in Indonesia was equal to the entire health spending at national, provincial, and district levels combined. This does not include additional losses due to tax evasion.

According to records obtained from the Indonesian Ministry of Forests, potential forestry sector revenue losses related to irregularities in licensing procedures for 727 problematic palm oil plantation units and 1722 mining units in seven Provinces were predicted at \$25 billion in 2011.

Indonesia is ranked 118th out of 176 countries on the Transparency International Corruption Perception Index, and is the fifth worst among SE Asian countries. Law enforcement is still weak, although a bribery case for obtaining a palm oil permit in Central Sulawesi was recently successfully prosecuted, and a \$450 million fine levied for tax evasion against the large palm oil company, Asian Agri, is currently being litigated. Both cases are illustrative of wider patterns of endemic corruption running throughout the sector. Law enforcement can be made more effective if law enforcement officials use an approach integrating Corruption Law, General Provisions and Taxation Procedures Law and Money Laundering Law.

infrastruktur.

Sebuah studi oleh Human Rights Watch mengungkapkan bahwa antara tahun 2003 hingga 2006, pendapatan negara sebesar 20 triliun rupiah per tahun hilang akibat korupsi dan kesalahan pengelolaan di sektor perkebunan Indonesia. Ini setara dengan biaya total layanan kesehatan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah ini masih diluar kerugian akibat penghindaran pajak.

Menurut catatan yang diperoleh dari Departemen Kehutanan Indonesia, potensi kerugian pendapatan sektor kehutanan yang berkaitan dengan penyimpangan dalam prosedur perizinan atas 727 kasus di perkebunan kelapa sawit dan 1722 kasus di sektor tambang di tujuh provinsi diperkirakan mencapai \$ 25 miliar pada 2011.

Indonesia kini menduduki peringkat ke-118 dari 176 negara terkorup menurut Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International, dan yang terburuk kelima di Asia Tenggara. Penegakan hukum masih lemah, meskipun kasus suap untuk mendapatkan izin kelapa sawit di Sulawesi Tengah baru-baru ini berhasil diadili, dan denda sebesar 450 juta dolar dikenakan untuk kasus penggelapan pajak terhadap perusahaan besar kelapa sawit, Asian Agri, yang saat ini sedang dalam proses di pengadilan. Kedua kasus tersebut menggambarkan pola yang lebih luas atas korupsi endemik di semua sektor. Penegakan hukum dapat dibuat lebih efektif jika aparat penegak hukum menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan UU Korupsi, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Hukum dan UU Pencucian Uang.

The finance sector also has a major role. However, the finance sector is too often implicated in aiding and abetting this criminal financial activity, which lines the pockets of a few at the expense of the public.

We call on the finance sector to aggressively increase due diligence efforts to identify and report suspected money laundering activities to appropriate authorities, and to avoid all financing to palm oil sector companies and their suppliers suspected of engaging in bribes, tax evasion or money laundering.

Working Conditions - Malaysia and Indonesia's palm oil sectors are listed by the US Department of Labor as being at significant risk of using child and forced labor in violation of international norms and conventions.

In addition to the risks of forced and child labor, migrant workers and their families generally have minimal rights and protections, and commonly suffer from sub-standard labor and living conditions, and lack of access to adequate health care and education for children.

Dangerous and highly hazardous pesticides, including paraquat, are still too widely used, posing numerous risks

Sektor keuangan juga memiliki peran besar. Meskipun begitu, sektor keuangan sangat sering terlibat dalam membantu dan menggagalkan aktifitas pendanaan tindakan kejahatan yang mengorbankan publik untuk memperkaya segelintir orang.

Kami menyerukan kepada sektor keuangan untuk meningkatkan uji tuntas (*due diligence*) dalam mengidentifikasi dan melaporkan kegiatan yang berpotensi sebagai upaya pencucian uang kepada pihak berwenang dan untuk menghindari semua bentuk pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan di bidang kelapa sawit dan para penyuplai mereka yang dicurigai terlibat dalam korupsi, penyelundupan pajak, ataupun pencucian uang.

Kondisi Kerja. Oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat, sektor kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia telah dimasukkan dalam daftar risiko tinggi terkait eksploitasi tenaga kerja anak dan kerja paksa yang melanggar norma-norma dan konvensi internasional.

Selain menghadapi risiko kerja paksa dan terjadinya pekerja anak-anak, pekerja migran dan keluarga mereka umumnya memiliki hak dan perlindungan yang sangat minim, dan umumnya menderita karena mesti hidup di bawah standar buruh dan standar hidup yang layak, dan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai dan pendidikan untuk anak-anak.

Pestisida yang beracun dan berbahaya, termasuk paraquat, masih dipergunakan secara luas di kedua negara ini. Hal ini menempatkan para pekerja, anak-anak,

English

to workers, children and their families and threatening the reproductive rights of women. The use of appropriate personal protective equipment for these pesticides is often impractical for workers in hot tropical conditions, as well as being ineffective in preventing harm.

We call on the finance sector to adopt zero tolerance policies for maintaining banking or investor relationships with producers and suppliers linked to child or forced labor.

Similarly, we call on banks and investors to ensure that their financing is limited to palm oil producers that do not use paraquat or other dangerous chemicals.

Land Grabbing and Food

Sovereignty – large industrial oil palm plantations are too often imposed on rural communities to the detriment of communities' rights over their productive resources, existing local food production and food security. This is taking place around Southeast Asia and increasingly in Africa and Latin America in a process commonly referred to as "land-grabbing"; the buying or leasing of large pieces of land in developing countries, by domestic and transnational companies, governments, and individuals, with negative consequences for local communities.

We call on banks and investors to end any financing of industrial palm oil plantations associated with land

Indonesia

dan keluarganya pada resiko terpapar zat beracun tersebut, serta mengancam hak-hak reproduksi kaum perempuan. Penggunaan alat pelindung untuk menangkal racun dari pestisida jenis ini ini sangat tidak praktis digunakan para pekerja, terutama di kondisi tropis yang udaranya cukup panas, selain itu juga tidak efektif menangkal dampak negatif dari pestisida yang dimaksud.

Kami menyerukan kepada sektor keuangan untuk menerapkan kebijakan untuk tidak mentolerir diteruskannya hubungan perbankan atau berinvestasi dengan para produsen dan penyuplai yang terkait dengan eksploitasi pekerja anak atau pekerja paksa.

Selain itu, kami juga menyerukan kepada pihak perbankan dan investor untuk memastikan tidak dipergunakannya parakuat atau bahan-bahan kimia berbahaya lainnya.

Perampasan Lahan dan Kedaulatan Pangan.

Perkebunan kelapa sawit skala besar terlampau sering mengambil manfaat dengan cara-cara yang merugikan masyarakat pedesaan melalui pengambilalihan hak mereka atas sumber daya produktif, produksi pangan lokal yang tersedia, dan kedaulatan pangan. Hal ini tidak saja terjadi di Asia Tenggara, tetapi juga di Afrika dan Amerika Selatan. Ini adalah proses yang lazim dikenal dengan istilah 'perampasan lahan', yakni pembelian atau penyewaan atas sejumlah besar lahan di negara-negara berkembang oleh perusahaan, pemerintah dan perorangan dalam negeri maupun asing, dengan imbal balik berupa akibat negatif bagi pihak masyarakat lokal.

Kami menyerukan pihak perbankan dan investor untuk mengakhiri segala pembiayaan industri perkebunan sawit

English

grabbing and to ensure that any remaining financing to the palm oil sector is consistent with implementation of the *FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*.

Supply chain traceability – Supply chain traceability and control starting from suppliers of oil palm fresh fruit bunches to processing mills through to end users is an essential tool for promoting responsible palm oil production practices, eliminating illegal and egregious sources from global supply chains and ensuring accountability.

We call on banks and investors to avoid financing of palm oil producers, refiners and traders that are unable or unwilling to implement full traceability systems in their supply chains back to all growers.

Conflict resolution and human rights – Indonesia's National Land Agency has registered more than 3,000 conflicts between local communities and palm oil companies. Communities resisting the takeover of their forests and farms for palm oil plantations are too commonly treated as criminals, subject of policy harassment and beatings, imprisonment of village leaders, forced relocations and extra-judicial killings. Regional authorities have the capacity to issue licenses, but lack the capacity to prevent and remedy social conflicts associated with

Indonesia

yang berasosiasi dengan perampasan lahan dan untuk memastikan bahwa segala pembiayaan yang akan diberikan kepada sektor sawit tetap konsisten dengan implementasi Panduan Sukarela FAO tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab terhadap Penguasaan Lahan, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional.

Dapat ditelusurinya rantai pasok. Dapat ditelusurinya rantai pasok, yang bermula dari para pemasok Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke pabrik sampai ke pengguna akhir, merupakan perangkat penting untuk mendorong praktik-praktik produksi minyak sawit yang bertanggung jawab, dengan menghilangkan sumber-sumber tidak sah dan buruk dari rantai pasok global dan dengan memastikan akuntabilitas.

Kami menyerukan kepada pihak perbankan dan investor untuk menghindari pembiayaan terhadap para produsen, penyuling, dan penjual minyak sawit yang tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan sistem dalam rantai pasok yang sepenuhnya dapat ditelusurilingga ke tingkat petani sawitnya.

Penyelesaian konflik dan hak asasi manusia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat lebih dari 3000 konflik antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan kelapa sawit. Masyarakat yang melawan konversi hutan dan lahan mereka menjadi kebun sawit amat sering diperlakukan sebagai kriminal, sehingga menjadi korban pelecehan dan penderitaan oleh kebijakan yang berlaku, pemenjaraan kepala desa dan bahkan pengusiran paksa. Pihak berwenang setempat memiliki kapasitas untuk mengeluarkan izin, akan tetapi tidak memiliki kapasitas untuk

English

these new licenses, making conflicts inevitable.

Under the *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, banks and investors have an obligation to respect and help remedy conflicts and human rights violations. We call on banks and investors to ensure that they assess what conflict resolution mechanisms, if any, of palm oil producer, traders and refining companies have and their effectiveness and do not finance companies without effective conflict resolution mechanisms. In addition, banks and institutional investors should create conflict resolution mechanisms of their own for any palm related financing which can be accessed by impacted rights-holders and stakeholders and functions to ensure that rights are respected and upheld.

Regulatory Governance of the Financial Sector - Government has a unique regulatory role that includes close oversight of the financial sector. Green banking regulatory initiatives reflect growing recognition that it makes little sense to allow financing of projects and activities that worsens the very social and environmental problems that government policies are attempting to address and reverse. In Indonesia, for example, the president has committed to a 26% reduction in greenhouse gas emissions below the projected business as usual emission level by 2020, and yet financing in key

Indonesia

mencegah ataupun 'mengobati' konflik sosial yang berhubungan dengan penerbitan izin-izin baru dimaksud, sehingga konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari.

Dibawah *UN Guiding Principle on Business and Human Rights*, pihak perbankan dan investor berkewajiban untuk menghormati dan mendukung proses pemulihan konflik & pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami menyerukan kepada pihak perbankan dan investor untuk memastikan bahwa mereka melakukan penilaian dan efektifitas atas mekanisme resolusi konflik yang ada di level produsen, penjual dan perusahaan pemurnian kelapa sawit; dan untuk tidak membiayai perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang baik. Selain itu, perbankan dan investor lembaga harus memiliki mekanisme penyelesaian konflik tersendiri untuk pembiayaan terkait sawit. Mekanisme ini harus bisa diakses oleh pemegang hak, pemangku kepentingan yang terdampak, serta harus berfungsi untuk memastikan dihormati dan dipenuhinya hak-hak tersebut.

Tata Kelola Kebijakan Sektor Keuangan - Pemerintah memiliki peran regulasi yang unik yang meliputi pengawasan yang ketat terhadap sektor keuangan. Inisiatif regulasi *green banking* mencerminkan pengakuan bahwa tidaklah masuk akal untuk terus menerus menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek yang akan memperburuk kondisi sosial dan lingkungan yang justru saat ini sedang diatasi oleh Pemerintah. Di Indonesia misalnya, Presiden telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26% untuk dicapai pada tahun 2020; namun pembiayaan bagi sektor utama seperti

English

sectors like oil palm, which are drivers of deforestation and social conflict, is allowed to continue, without use of sector best practice ESG performance standards, due diligence requirements and other accountability measures. In Brazil, government mandated improvements in environmental due diligence requirements for rural credit programs in the Amazon reduced deforestation by 15%, or over 2,700 km², from 2009 to 2011, demonstrating a clear link between government credit policy and deforestation rates.

We call on relevant financial regulatory bodies to develop mechanisms to ensure that: best-practice oil palm sector performance standards are consistently adopted and implemented by financial institutions; financial institutions are held accountable for compliance; accessible dispute resolution mechanisms are established; and these measures include regular and transparent reporting by regulatory agencies on the performance of individual financial institutions in contributing to the achievement of regulatory policies and the goals outlined in this statement for the oil palm sector.

Indonesia

kelapa sawit, yang merupakan pemicu deforestasi dan konflik sosial, masih tetap dilanjutkan, tanpa adanya standar tata kelola lingkungan dan sosial yang baik, uji tuntas (due diligent) dan langkah-langkah pertanggungjawaban lainnya. Di Brazil, Pemerintah mengamanatkan perbaikan dalam persyaratan uji tuntas lingkungan untuk program kredit pedesaan di Amazon. Hal ini mampu mengurangi deforestasi sebesar 15%, atau mencakupi area seluas lebih dari 2.700 km² dalam kurun waktu dari tahun 2009-2011. Hal ini menunjukkan hubungan yang jelas antara kebijakan kredit pemerintah dan rerata kerusakan hutan.

Kami menyerukan kepada otoritas keuangan untuk mengembangkan mekanisme yang memastikan bahwa: praktik terbaik sebagai standar kinerja sektor kelapa sawit secara konsisten diambil dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan; lembaga keuangan bertanggung jawab atas kepatuhan; dimunculkannya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses; dan langkah-langkah tersebut mencakupi laporan rutin dan transparan oleh otoritas keuangan terhadap kinerja lembaga-lembaga keuangan secara individual dalam upaya tercapainya berbagai aturan kebijakan dan tujuan yang digariskan dalam pernyataan ini untuk sektor minyak sawit.

Signed and endorsed by:

1. Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA)
2. Rainforest Action Network (RAN), USA
3. WALHI Eksekutif Nasional, Indonesia
4. Forest Peoples Programme, UK
5. ELSAM, Indonesia
6. Public Interest Lawyer Network (PILNET), Indonesia
7. Lembaga Gemawan, Kalimantan Barat, Indonesia
8. Swandiri Institute, Kalimantan Barat, Indonesia

9. Yayasan PUSAKA, Indonesia